

## **Paradigma Sosio-kultural Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan**

**Supiyardi<sup>1\*</sup>, Selamet<sup>2</sup>, Agus Samsul Nahar<sup>3</sup>, Ateng Rohendi<sup>4</sup>, Izzudin Musthafa<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunungjati Bandung

<sup>1</sup>[supiyardiuin@gmail.com](mailto:supiyardiuin@gmail.com), <sup>2</sup>[selamet@gmail.com](mailto:selamet@gmail.com), <sup>3</sup>[agussamsulnahar@gmail.com](mailto:agussamsulnahar@gmail.com),

<sup>4</sup>[atengrugendu@uinsgd.ac.id](mailto:atengrugendu@uinsgd.ac.id), <sup>5</sup>[izzudin@uinsgd.ac.id](mailto:izzudin@uinsgd.ac.id)

\*Correspondence

Received: April 2020 | Accepted: June 2020 | Published: September 2020

### **Abstract**

Character education is a foundation for building a social society. A nation of character is a nation with morals focused on peace, prosperity and helpfulness to society. The challenge is how Islamic education can strengthen character in accordance with the noble tenets of the nation's cultural values. Against this background, the need to rebuild the Islamic educational paradigm with a socio-cultural approach in shaping the national character is considered. Education must be restored to its hierarchy so that it is consistent with the ideals and goals of national education. This study uses a descriptive qualitative research method of library research type, a research method that explores ideas and theories from the results of searching library documents. From the results of the study it is clear that from a cultural perspective, education forms a cultural paradigm in education. Because education is part of the culturalization process. Education and cultivation are inseparable processes. Therefore, education is part of the humanization process. When building a socio-cultural paradigm, education must be returned to the general guidelines of the nation and the state. Pancasila as a source of national and state knowledge and values should be the basis for educational practice. so that education corresponds to the national character. The values of civility and harmony that constitute the pride of national culture are becoming weaker and increasingly worrisome with the influx of global cultural values. The character and identity of this nation are becoming increasingly unclear due to the increasingly uncertain nature of society. It is hoped that Islamic education can be a solution to realize the character formation of the country's children.

**Keywords :** 3–5 *Keywords (Book Antiqua 10, italic)*

### **Abstrak :**

Pembentukan karakter adalah suatu pondasi dalam membangun sosial masyarakat. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang memiliki moral, berorientasi pada perdamaian, kesejahteraan, dan kondusivitas masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana pendidikan Islam dapat membangun karakter sesuai dengan prinsip luhur nilai budaya bangsa. Hal ini menjadi latar belakang pemikiran perlu adanya membangun ulang paradigma pendidikan Islam dengan pendekatan sosio-kultural dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan perlu dikembalikan pada hirarkisnya sehingga sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Pada kajian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi pustaka (*library research*) suatu metode penelitian yang mengkaji sebuah pemikiran dan teori dari hasil penelusuran dokumen kepustakaan. Dari hasil kajian bahwa pendidikan dalam perspektif kultural yakni membangun paradigma kultural dalam pendidikan. Karena pendidikan adalah bagian dari proses kulturalisasi. Pendidikan dan pembudayaan adalah suatu proses yang tidak terpisahkan. Karena itu pendidikan adalah bagian dari proses humanisasi. Dalam

membangun paradigma sosio-kultural, pendidikan perlu dikembalikan pada pedoman umum berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber dari pengetahuan dan nilai berbangsa dan bernegara, layaknya menjadi landasan dalam praktik pendidikan. sehingga pendidikan sesuai dengan karakter bangsa. Nilai kesantunan dan kerukunan yang menjadi kebanggaan budaya bangsa menjadi lemah dan semakin memprihatinkan seiring dengan masuknya nilai-nilai budaya global. Sehingga karakter dan jati diri bangsa ini semakin tidak jelas disebabkan oleh karakter masyarakat yang semakin tidak menentu. Melalui Pendidikan Islam diharapkan bisa menjadi sebuah solusi untuk mewujudkan pembentukan karakter anak bangsa.

**Kata Kunci:** *Islamic education, socio-cultural, national character*

## PENDAHULUAN

Dalam suatu perkembangan sosial, secara alamiah masyarakat akan mengalami perubahan. Namun, apakah perkembangan sosial tersebut akan mengarah kepada perubahan yang bersifat konstruktif atau pada yang bersifat destruktif. Arah perubahan sosial-masyarakat tidak terlepas dari adanya peran pendukung pendidikan yang merupakan bagian dari sub-sistem sosial. Apabila mencermati kondisi pendidikan di Indonesia, sebenarnya telah mengalami pembaharuan. Tujuan pembaharuan itu adalah untuk menjaga agar pendidikan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan sosialnya. Namun apakah dalam pembaharuan pendidikan tersebut pada wilayah kualitatif (mutu) ataukah pada wilayah kuantitatif, yakni hanya sebatas pemenuhan kebutuhan kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya. Sampai saat ini, pendidikan masih terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan yang otoriter. Karena sistem pendidikan pada saat ini masih dimiliki oleh golongan masyarakat tertentu. Patut diakui bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia secara kuantitatif mengalami kemajuan, tetapi pemberdayaan masyarakat secara luas dan merata sebagai cermin dari keberhasilan pendidikan belum nampak sampai hari ini.

Pendidikan merupakan suatu proses pemberian manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri (Nurani, 2010). Maka, pendidikan adalah bagian dari kegiatan sosial masyarakat yang tidak terpisahkan. Pendidikan merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu faktor perubahan pola kehidupan masyarakat. Namun, jika pendidikan sudah berada pada posisi sebagai alat hegemoni penguasa yaitu sebagai cara atau metode dalam mempertahankan status quo. Akibatnya sistem pendidikan kemudian dijadikan salah satu instrumen untuk menciptakan *safety net* bagi pelestarian kekuasaan. Sedangkan visi dan misi pelestarian

kekuasaan itu melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat *straight jacket* dan inilah penyebab kesenjangan terhadap pendidikan (Sanaky, 2003). Pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang holistic serta mampu membawa manusia pada keterbukaan dunia secara universal. Sehingga tahap akhir dari proses pendidikan adalah menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya baik internal (*self*) maupun lingkungannya (*problem solving*).

Kondisi pendidikan Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan nasional, karena pendidikan Islam sendiri merupakan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan Islam mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis dalam pola perubahan masyarakat. Pendidikan Islam setidaknya mengorientasikan diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbal-balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat baik dalam aspek kemajuan, peradaban dan sejenisnya, tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan dapat dijadikan cermin majunya masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga penuh persoalan (Naim, 2017).

Pada era reformasi ini, pendidikan nasional ditekankan untuk membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pendidikan hendaknya didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk membentuk suatu “masyarakat madani” yang demokratis. Pendidikan harus bertolak dari pengembangan manusia Indonesia yang berbudaya dan berperadaban, merdeka, bertakwa, bermoral dan berakhhlak, berpengetahuan dan berketerampilan, inovatif dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara profesional dalam kehidupan global menuju masyarakat madani Indonesia (Sanaky, 2003).

Pembicaraan mengenai pendidikan akan selalu hangat untuk diperbincangkan. Dalam kajiannya tidak akan menemukan titik final karena dalam setiap kondisi ataupun situasi akan selalu berubah. Oleh karena itu, pendidikan akan menjadi pembahasan yang

selalu *up to date* untuk diperbincangkan. Sebagai respons terhadap perubahan-perubahan tersebut maka pendidikan dibutuhkan penyegaran kembali dalam orientasi maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya untuk merekonstruksi, reorientasi, serta restrukturisasi pendidikan sehingga lebih realistik dan sesuai dengan konteks perkembangan dan perubahan masyarakat. Sebab, bagaimanapun sederhananya suatu proses pendidikan, *ultimate goal*-nya harus diarahkan pada tujuan yang lebih mulia, yakni membuat manusia benar-benar menjadi manusia. Berbagai persoalan dalam situasi sosial masyarakat saat ini, menjadi fakta bahwa pendidikan belum menemukan *problem solver*-nya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan mengadakan suatu pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai literatur, jurnal, dan buku. Membangun suatu konsep dan teori merupakan dasar dari penelitian studi pustaka atau kajian pustaka (Sujarweni, 2014). Kajian pustaka merupakan suatu kewajiban dalam akademik dengan tujuan untuk mengembangkan dari aspek secara teoritis maupun praktis (Sukardi, 2021). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data kuantitatif maupun alat ukur statistik (Nasution, 2003). Sesuai dengan objek skripsi ini maka jenis penelitian ini adalah kategori studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. Penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku, majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah. Studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Paradigma Sosio-Kultural Pendidikan**

Menurut Mastuhu pendidikan pada dasarnya hanya satu yaitu memanusiakan manusia. Dengan kata lain mengangkat harkat dan martabat manusia (*human dignity*), yaitu mengangkat manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Dengan perkataan lain, menurut istilah agama menjadi khalifah di bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan (Tolchah, 2015). Salah satu upaya preventif yang kemudian direkomendasikan adalah membangun kesadaran dan

pemahaman akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam kehidupan sosial.

Pendidikan bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang pintar dan terdidik. Namun jauh lebih penting lagi adalah pendidikan mewujudkan manusia yang terdidik dan juga memiliki kepakaan terhadap budaya (educated and civilized human being) juga berdasarkan pada peserta didik, pasar, atau bahkan tuntutan perkembangan zaman. Idealnya sistem pendidikan itu diarahkan pada pemahaman kebudayaan Indonesia yang Bhineka dengan menanggalkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan golongan (Mastuhu, 2003). Pendidikan menciptaka manusia yang berbudaya, yang memiliki tata etik dalam kehidupan sosial sehingga memunculkan keharmonisan hubungan di antara individu masyarakat. Dengan demikian, pendidikan memberikan stimulasi terhadap peradaban menuju masyarakat yang beradab dan bersusila.

Pada dasarnya antara pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan dan begitu pula tidak ada praksis pendidikan di dalam vakum tetapi selalu berada di dalam lingkup kebudayaan yang konkret. Pendidikan akan vakum tanpa proses pembudayaan, begitupula kebudayaan akan stagnan tanpa proses pendidikan. Pendidikan akan selalu membutuhkan proses pembudayaan dan kebudayaan akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Tujuan untuk membangun kembali masyarakat Indonesia dari krisis multidimensi maka pendidikan dalam perspektif kultural merupakan suatu kebutuhan yang sudah mendesak. Hal tersebut akan nampak pada proses pendidikan yang selama ini belum menunjukkan progresivitasnya terhadap pembentukan karakter bangsa yang menuju masyarakat Pancasilais.

Proses pendidikan belum dimaknai sebagai proses pemberdayaan diri dan sekaligus sebagai pembangunan budi pekerti menjadi cermin bahwa pendidikan pada hari ini sedang mengalami krisis multidimensi. Generasi muda yang sampai hari ini sudah “dininabobkan” oleh kebudayaan dan perkembangan kemodernan peradaban menyebabkan hilangnya jati diri bangsa. Akibatnya, kebesaran bangsa sebagai negara yang multi etnik dan multikultural telah hilang dari dalam diri generasi para penerus bangsa. Sudah bisa dipastikan, ketika para generasi penerusnya sendiri tidak memiliki kebanggaan terhadap kebesaran bangsanya maka bangsa tersebut sudah tercerabut dari

kebudayaannya sendiri. Karena itu, untuk menjawab persoalan tersebut dibutuhkan suatu konsep pendidikan dalam perspektif kultural.

Sebagai titik tolak analisis mengenai hakikat kebudayaan yang dapat digunakan untuk memahami hakikat pendidikan. Dalam hal ini mengambil rumusan pelopor antropologi yaitu Edward B. Tylor dalam bukunya "Primitive Culture" yang terbit pada Tahun 1871 mendefinisikan atau menjelaskan bahwa; "Kebudayaan atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuankemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat" (Tilaar, 2002).

Kultur yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebagai indentitas bangsa yang kemudian menjadi modal utama dalam menciptakan pendidikan yang bersifat egaliter, demokratis, adil serta mampu bersaing dalam kancah dunia internasional. Dengan ini masyarakat mampu menjadi warga global dengan tidak akan lagi ada kekawatiran akan kehilangan jati diri atau bahkan tercerabut dari akarnya sebagai bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaknya, masyarakat, bangsa dan negera (Perpusnas, 2003). Walaupun secara definisi para tokoh pendidikan mempunyai banyak versi dalam mempersepsikan pendidikan Namun makna dan tujuannya tidak keluar dari hakikat pendidikan itu sendiri. Proses pendidikan yang diselenggarakan bukan hanya semata-mata untuk membentuk suatu kecerdasan intelektual semata.

Pengertian pendidikan yang dijelaskan dalam UU Sisdiknas tersebut adalah selain membentuk kecerdasan secara intelektual, juga membentuk kecerdasan emosional maupun spiritual. Jadi secara garis besar dapat terlihat komponenkomponen yang akan dituju dalam membentuk manusia Pancasilais yang beradab dan bersusila yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Karena pada dasarnya manusia hendaknya memiliki kesadaran terhadap lingkungan (sebagai kecerdasan emosional). Artinya, keberadaannya sebagai makhluk, memiliki tata peradaban dan berakhlak terhadap alam dan lingkungannya. Begitulah sebagai tujuan

pendidikan Nasional dengan dasar tujuan asas Pancasila. Harapannya pendidikan tersebut dapat membentuk masyarakat Pancasilais yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.

Pendidikan dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas perubahan. Ini adalah landasan epistemologi dan prinsip-prinsip umum dari pendidikan atau terminologi al-Syaibany dikatakan sebagai “prinsip perubahan yang diingini”. Dalam realitas kehidupan, sebagai kondisi riil pendidikan dapat dilihat dari adanya perubahan sosial yang begitu cepat. Pendidikan harus senantiasa toleran dan tunduk terhadap perubahan normatif dan kultural yang terjadi. Pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah institusi sosial yang berfungsi sebagai pembentuk insan yang berbudaya dan melakukan proses pembudayaan nilai-nilai. Dengan demikian, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal penting yang saling terkait satu sama lain dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Disatu sisi, pengembangan dan pelestarian budaya berlangsung dalam suatu proses pendidikan, hal ini tentunya memerlukan rekayasa pendidikan. Sementara itu, pengembangan pendidikan juga membutuhkan sistem kebudayaan sebagai akar dan pendukung berlangsungnya pendidikan tersebut. Pengembangan kebudayaan juga membutuhkan kebebasan kreatif sementara pendidikan memerlukan stabilitas budaya yang mapan (Baharuddin et al., 2009). Jika fungsi utama pendidikan adalah pelestari kebudayaan dan ilmu sekaligus mengembangkannya, maka filsafat sebagai ilmu dan bagan konseptual kebudayaan akan menjadi basis intelektual bagi penyusun konsep pendidikan dan juga penyelenggaraan proses belajar mengajar (Mulkhan, 1993).

Secara kontekstual, pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusia sehingga dapat menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi, tentunya harus melihat bagaimana pendidikan dipandang tersebut sebagai sebuah proses yang tidak terpisahkan dari manusia. Artinya, orientasi dan tujuan pendidikan harus dikembalikan kepada semangat kemanusiaan dengan membentuk masyarakat yang konstruktif positif. Pendidikan dalam studi kultural adalah sebagai upaya untuk mengembalikan tujuan dasar dari proses pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri (individual). Ia merupakan makhluk kolektif yang hidup secara komunal untuk membentuk suatu interaksi sosial. Karena itu, pendidikan di sini dimaksudkan untuk mempersiapkan manusia pada perubahan lingkungan yang sifatnya membangun masyarakat yang konstruktif-positif.

Ki Hadjar Dewantara sendiri mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran (intellect) dan tubuh anak (Dewantara, 1977). Sedangkan menurut Romo Mangun Wijaya, pendidikan adalah proses awal usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Karena itu, menurut ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbal balik) antara pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat, yang jelas pendidikan itu menumbuhkan nalar kritisisme sosial (Yamin, 2009).

Pendidikan sebagai institusi sosial memberikan peran terhadap transformasi dan internalisasi nilai-nilai kultural masyarakat. Pada dasarnya proses pendidikan merupakan bagian dari kegiatan untuk membentuk konstruksi kultural masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme, keadilan, demokratis, dan seterusnya. Sehingga proses konstruksi kultural masyarakat tersebut menjadi bagian dari semangat untuk membentuk masyarakat Pancasilais. Maka, pendidikan tidak layaknya “menara gading” yang menjauhkan diri dari realitasnya. Karena pendidikan sendiri tidak akan terlepas dari suatu fakta sosial. Dengan memperhatikan pengembangan budi pekerti, kecerdasan emosional, kesadaran sosial dan lain sebagainya, akan mengembalikan proses pendidikan pada hakikat dan tujuannya. Pendidikan berfungsi untuk melakukan proses penyadaran terhadap manusia sehingga mampu mengenal, mengerti dan memahami realitas kehidupan yang ada disekitarnya

## **2. Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Kebangsaan**

Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem Pendidikan, tidak dipungkiri memiliki kontribusi yang cukup mapan untuk menyokong pembentukan karakter bangsa dengan berbagai strategi dan metode yang cukup mengesankan dan menyakinkan. Seperti terlihat pada sistem pengajaran pada pendidikan Islam yang diarahkan bukan hanya pencapaian peningkatan kecerdasan (akal) semata bagi peserta didik namun yang lebih esensial dalam pendidikan Islam justru diharapkan melahirkan Insan yang paripurna (memiliki keimanan dan akhlak mulia). Demikian juga dalam proses pencapaian tersebut pendidikan Islam tidak hanya menjadi beban bagi pendidik (guru) justru tanggung jawab pertama dan utama orang tua di rumah tangga dalam membentuk keperibadian anaknya mulai dari kandungan, lahir bahkan sampai aqil baligh. Peranan orang tua dapat memberikan rasa

nyaman, aman dan keamanan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini pada anak-anak mereka (Anwar, 2018).

Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan substansi makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam, keduanya membahas tentang perbuatan prilaku manusia. Al-Ghazali menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikirandan pertimbangan (Rusn, 2009). Suwito menyebutkan bahwa akhlak sering disebut juga ilmu tingkah laku atau perangai, karena dengan ilmu tersebut akan diperoleh pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan jiwa; bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana membersihkan jiwa yang telah kotor (Mu'minah, 2015).

Dalam pandangan Majid, fokus dan tujuan utama pendidikan karakter adalah tercapainya standar baku yaitu etika. Sehingga Majid mengartikan pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku (Majid & Andayani, 2012). Namun kenyataannya perkembangan sosial anak didik dan penguatan kecakapan adalah termasuk sasaran dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia yaitu bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5) Kerja Keras, 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa Ingin Tahu, 10) Semangat Kebangsaan, 11) Cinta Tanah Air, 12) Menghargai Prestasi, 13) Bersahabat/ Komunikatif, 14) Cinta Damai, 15) Gemar Membaca, 16) Peduli Lingkungan, 17) Peduli Social, 18) Tanggung Jawab (Mukhlis, 2020). Pada dasarnya tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU Sistem pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 sudah sangat jelas tentang fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan bukan hanya sebatas transfer of knowledge, melainkan membentuk karakter, akhlak atau pun budi pekerti sehingga menjadikan peserta didik insan paripurna.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebenarnya pendidikan karakter menempati posisi yang penting, hal ini dapat kita lihat dari tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan*

*kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratisserta bertanggung jawab”* (Perpusnas, 2003)

Karakter Bangsa adalah salah satu dari sembilan unsur kekuatan nasional tak kasat mata (intangible) suatu bangsa. Sebagai salah satu kekuatan nasional, karakter nasional harus dipelihara dan senantiasa direvitalisasi agar selalu bisa menjadi inspirasi, pengobar semangat dan mampu berfungsi sebagai human capital sebuah bangsa karena karakter nasional menentukan ketahanan nasional bangsa yang bersangkutan. Berkaitan dengan konteks karakter sebuah bangsa, maka yang menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilannya adalah sejauh mana keberhasilan bangsa tersebut memajukan pendidikan nasional, yang bertumpu pada tiga komponen, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendidikan diartikan sebagai pembiasaan, pembelajaran, peneladanan, bukan sekedar penyekolahan (*schooling*). Sebagai sebuah konvensi, peradaban manapun meniscayakan pembangunan karakter nasional merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan bidang pendidikan pada khususnya (Anwar, 2018).

Karakter dimaknai sebagai nilai utama yang melekat pada setiap insan manusia sebagai warga negara yang kemudian diejawantahkan sebagai personalitas diri serta penanda identitas kolektif bangsa. Dalam konteks suatu bangsa, karakter berfungsi sebagai kekuatan identitas dan kekuatan mental bangsa yang mendorong suatu bangsa dalam merealisasikan cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa, dengan menampilkan keunggulan-keunggulan yang kompetitif, komparatif dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Nilai karakter harus ditanamkan semenjak dini karena akan membentuk pembiasaan diri dalam melaksanakan nilai-nilai karakter dalam kehidupan tanpa mereka sadari dan secara perlahan akan membentuk karakter baik dalam diri peserta didik sebagai generasi penerus bangsa yang rentan dengan terjangan arus globalisasi, yang akan membawa mereka secara perlahan meninggalkan jatidiri bangsa Indonesia dengan hidup apatis (Cicilia & Santoso, 2022).

Islam mendefinisikan bahwa karakter adalah tujuan utama pendidikan. Al-Qur'an dan sunnah merupakan pedoman akhlak. Ukuran baik dan buruk mengacu kepada kedua sumber tersebut. Standar lain yang dijadikan pedoman akhlak adalah akal, hati, dan

penilaian masyarakat. Karakter menjadi sasaran utama pendidikan Islam, karena karakter menjadi identitas suatu negara dan individu. Tidak heran jika dalam hadis Nabi terdapat keutamaan akhlak seperti hadis Nabi yaitu: “ajarilah anak-anakmu kebaikan dan didiklah mereka”. Pendidikan karakter menekankan pada aspek moral, mengedepankan sikap kepribadian religius, berkarakter dan peduli terhadap lingkungan sehingga harus dilatih sejak dini dan berkelanjutan. Kepribadian memiliki tiga komponen. *Pertama* kesadaran moral, yang meliputi kesadaran etis, pemahaman nilai-nilai moral, penentuan moral yang baik, penalaran etis (*moral reason*), pengambilan keputusan pertimbangan moral (*decision making*), persepsi diri. *Kedua* emosi moral, yaitu aspek lain yang harus ditanamkan sebagai sumber kekuatan untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika, antara lain: hati nurani (*conscience*), harga diri (*trust*), empati, cinta kebenaran, pengendalian diri dan kerendahan hati. *Ketiga* perilaku etis yaitu kemampuan, keinginan, dan pembiasaan (Kulsum & Muhib, 2022).

Budi pekerti luhur, kesantunan, dan relegiusitas yang dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi terasa asing dan jarang ditemui ditengah-tengah masyarakat. Pendidikan karakter kebangsaan menjadi sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan sosial masyarakat yang terjadi serta lembaga sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang mampu mewujudkan misi dari pendidikan karakter tersebut (Ainiyah, 2017). Pendidikan perlu didesain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan hidup, kemampuan bernalar (*critical thinking*), menemukan solusi (*problem solving*), membangun komunikasi (*communication*), membuat kerja sama dan jejaring (*collaboration and social network*), menciptakan kreativitas (*creativity*) dan melakukan inovasi perlu untuk menghasilkan peserta didik yang cakap dan berkarakter kebangsaan (Kulsum & Muhib, 2022).

## SIMPULAN

Perubahan dan tantang zaman akan terus menjadi pekerjaan rumah dalam membangun paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Globalisasi dan arus perkembangan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perubahan-perubahan sosial masyarakat. Pendidikan perlu dikembalikan kepada hirarkinya, yakni membentuk karakter dan budi pekerti. Untuk pendidikan nasional sendiri yang dituju

adalah karakter kebangsaan, yakni karakter yang lahir dari nilai-nilai agama, budaya, yang terrangkum dalam Pancasila. Karena itu, rekonstruksi pemikiran dalam membangun paradigma pendidikan Islam sangat dibutuhkan. Untuk menemukan jalan arah kembali pada hakikat tujuan pendidikan Islam. Sesuai dengan amanah UU dasar 1945 yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, berarti membangun dan mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat, sebagai penerus bangsa. Paradigma sosio-kultural pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa adalah suatu kebutuhan dalam membangun paradigma pendidikan nasional. Hal ini menjadi landasan pemikiran dalam kajian penulisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainiyah, N. (2017). *Membangun Penguan Budaya Literasi Media dan Informasi dalam Dunia Pendidikan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/300055484.pdf>
- Anwar, S. (2018). Pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa di era milenial. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 233–247.
- Baharuddin, M. M., Makin, M., & Shaleh, A. Q. (2009). Pendidikan Humanistik, Konsep, Teori dan Aplikasi Praktis dalam Dunia Pendidikan. *Yogyakarta: AR-Ruzz Media*.
- Cicilia, I., & Santoso, G. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Generasi Penerus Bangsa yang Berkarakter. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 146–155.
- Dewantara, K. H. (1977). Bagian pertama pendidikan. *Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*, 1, 215.
- Kulsum, U., & Muhib, A. (2022). Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Digital. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 12(2), 157–170.
- Mastuhu, M. (2003). *Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, Cetakan pertama*. Yogyakarta.
- Mu'minah, N. (2015). Character Building Dalam Konsep Pendidikan Imam Zarkasyi Ditinjau Dari Filsafat Moral Ibnu Miskawaih. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 100–133.
- Mukhlis, A. A. (2020). Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Anak Millenial. *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 66–79.
- Mulkhan, A. M. (1993). *Paradigma intelektual Muslim: pengantar filsafat pendidikan Islam dan dakwah*. MediaPressindo.
- Naim, N. (2017). *Pendidikan multikultural, konsep dan aplikasi* (Vol. 1). Ar-Ruzz Media.
- Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung). Tarsito. *Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php*.
- Nurani, S. (2010). Teori-teori Pendidikan: Tradisional, Neoliberal, Marxis, Sosialis, Postmodern. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.

- Perpusnas. (2003). UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. *Perpusnas.Go.Ig*, 19(8), 159–170. bisnis ritel - ekonomi
- Rusn, A. I. (2009). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, 2005, Mawaridul Aman Al-Muntaqa Min Ighatsatul Lahfan Fi Masyidisy Syaitan, Terj. Ainul Haris Umar Arifin, Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157–178.
- Sanaky, H. A. H. (2003). *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. MSI, Universitas Islam Indonesia.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. *Bandung: Rosda*.
- Tolchah, H. M. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru: Pendidikan*. LKiS Pelangi Aksara.
- Yamin, M. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Ar-Ruzz Media.